

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### 5.1. Kesimpulan

1. Proses implementasi transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara di mulai pada tahun 2018 sesuai Peraturan Bupati Jepara Nomor 03 tahun 2018 yang di tanda tangani oleh bapak Bupati pada tanggal 02 Januari 2018. Meliputi penerimaan dan pengeluaran APBD. Pelaksanaan penerapan transaksi non tunai pada tata kelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jepara sudah berdasarkan *good governance* tetapi belum sepenuhnya optimal.
2. Implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi saat ini belum efektif. Hal tersebut terkait dengan masalah infrastruktur dan Rekening. Meskipun penerapan transaksi non tunai belum efektif, tetapi dengan penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya menggunakan transaksi tunai beralih menjadi transaksi non tunai mempermudah atau mempercepat bendahara untuk membuat laporan pertanggungjawaban.

#### 5.1 Saran

Penelitian yang diajukan peneliti berupa saran-saran atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain :

1. Pemahaman terhadap penerapan transaksi non tunai, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan masukan terkait penerapan transaksi non tunai agar kedepannya penerapan transaksi non tunai dapat dijalankan dengan efektif dan maksimal demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara.
2. Penerapan transaksi non tunai, diharapkan dengan ini mampu meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penerapan transaksi non tunai, serta bisa mengatasi masalah-masalah terkait dengan dukungan infrastruktur dan Rekening di Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan memperluas atau memperdalam pertanyaan-pertanyaan terkait transaksi non tunai, sehingga dapat diketahui secara lebih luas implikasi penerapan transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

